

Ina Mirawati :

PEMBERANTASAN BUTA HURUF: SEBUAH CATATAN MENUJU SUKSESNYA KEBANGKITAN NASIONAL

Dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 (pascaperubahan) disebutkan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain ketentuan di atas, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan jelas mempunyai arti yang sangat penting bagi setiap orang karena dengan pendidikan dapat menghindarkan diri dari kebodohan dan kemiskinan, meningkatkan pengetahuan, memperoleh prestasi dan yang terpenting adalah ada perasaan untuk membangkitkan nasionalisasi di hati setiap manusia terhadap bangsa dan negaranya.

Di dalam arsip pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terpeta dengan jelas bahwa bangsa Indonesia juga memperoleh pendidikan yang cukup layak walaupun mereka adalah rakyat berlatar belakang dari keluarga tidak mampu. Pemerintah Hindia Belanda masih memikirkan pendidikan untuk bangsa Indonesia, mereka mendirikan sekolah-sekolah dengan fasilitas seadanya. Gedung sekolah yang sederhana dibangun dan anak-



Presiden Soekarno sedang membantu mengajarkan masyarakat yang buta huruf di Yogya, 1946. ANRI, Foto IPPHOS No. 261

anak dengan berpakaian seadanya bersemangat belajar, bahkan guru yang mengajarkannya adalah orang pribumi juga. Tercatat bahwa anak-anak yang bertugas membantu orang tuanya di sawah diwajibkan untuk tetap bersekolah agar mereka terhindar dari buta huruf. Pembagian antara sekolah dan pekerjaan diatur sedemikian rupa sehingga sehabis pulang sekolah mereka dapat membantu orang tuanya. Pemerintah Hindia Belanda juga menganggarkan subsidi bagi penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan. Contohnya pendidikan di Kalimantan Barat di mana anak-anak dapat menikmati pendidikan dengan subsidi dari pemerintah Hindia Belanda.

Masa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya adalah masa di mana pemimpin bangsa Indonesia mempergiat pendidikan melek huruf (*literacy*) bagi masyarakat Indonesia. Di sini terlihat bahwa ada hubungan antara masalah pemberantasan buta huruf dengan kebangkitan nasional ketika pada tanggal 27 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) menyatakan hasratnya agar diadakan perguruan orang dewasa yang memberi pengajaran pemberantasan buta huruf hingga bersifat *volksuniversitet*. (Prof. Soegarda Poerbakawatja, Ensiklopedi Pendidikan, Gunung Agung, 1976, hlm 226).



LDH School di Medan.
ANRI, Foto KIT Sum-Ut No. 77/14

Adalah suatu hal yang mencengangkan bahwa untuk menggiatkan pemberantasan buta huruf ini maka Presiden Soekarno yang mengadakan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyempatkan waktunya untuk mengajarkan ibu-ibu dan bapak-bapak yang buta huruf. Terpampang dengan jelas spanduk dengan tulisan besar-besar “Bantulah Usaha Pemberantasan Buta Huruf”, di tempat di mana Presiden Soekarno mengajarkan membaca kepada masyarakat yang sangat antusias mengikutinya.

Para guru juga tidak bosan mengajarkan masyarakat untuk melek huruf. Setiap kelas selalu penuh dengan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin belajar sehingga mereka dapat membaca surat kabar yang biasanya ditempelkan di papan pengumuman oleh Dinas Jawatan Penerangan. Dalam Kongres Mahasiswa/Pelajar se-Nusa Tenggara Timur yang dilangsungkan pada 17-24 Juli 1957, salah satu keputusannya yang utama adalah mendesak pemerintah agar mengintensifkan pemberantasan buta huruf. Keputusan tersebut jelas menggambarkan bahwa masalah pendidikan, sehingga tidak ada lagi bangsa Indonesia yang buta

huruf, sangat penting bagi seluruh masyarakat.

Namun pendidikan tidak hanya terbatas pada dapat membaca, melainkan juga harus dapat membentuk masyarakat agar tetap konsisten dapat membaca kitab suci seperti yang terjadi di daerah Jawa

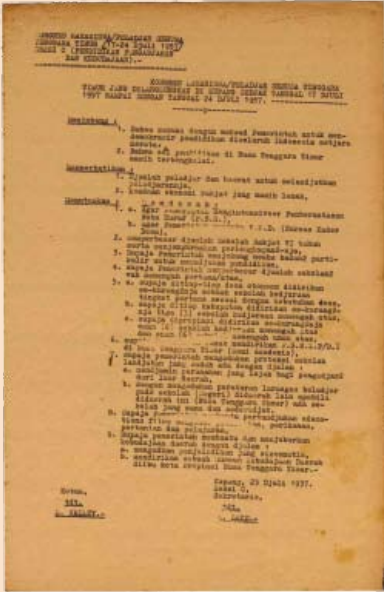
Barat, di mana daerah ini adalah salah satu daerah yang sangat kuat dengan ajaran agama Islamnya. Pemuka agama tidak melulu hanya mewajibkan anak-anak untuk belajar di sekolah umum tetapi anak-anak juga diajarkan pendidikan agama yaitu membaca Al Qur'an. Kegiatan ini juga merupakan salah satu cara untuk membangkitkan rasa nasionalisme di hati anak-anak bahwa mencerdaskan bangsa juga harus disertai dengan pendidikan agama sehingga dapat melahirkan putra-putri Indonesia yang sehat baik akal, moral maupun jasmani.

Menggambarkan upaya pemerintah Indonesia melakukan pemberantasan buta huruf dengan menampilkannya dalam sebuah foto adalah sangat menarik karena dengan foto kita dapat melihat situasi bagaimana keadaan pada sebuah masa dan membandingkannya dengan keadaan saat ini. Oleh karena foto adalah penyingkap sejarah, kehadiran visual yang melahirkan teks-teks baru dalam kehidupan, maka teksipun dapat

School	Aantal leerlingen		Absentie per-centage over Juni 1934.	Aantal onderwijzers.
	Ju-ly 1934	Mei-1934		
VolksschoolFonds.				
Volksschool te Ngabang	102 1)	54	86 2)	2.
idem te Sarimböe	77	275	12	1.
idem te Sekendal.	12	212	17 3)	1.
idem te Senakin.	18 3)	178	-	1.
idem te Sangkoe.	2 55 4)	-	-	1.
idem te Darit.	25 5)	185	-	1.
M.I.S.S.I.S.				
Misievolksschool te Teudang.	12	-	7	1.
Chineesche scholen.				
Perit school te Ngabang	30	4	7	2.
idem te Teudang	12	-	7	1.
idem te Moeza-Saba	20	10	7	1.
idem te Ijoeng	12	2	7	1.
idem te Perigi	25	-	7	1.
Totaal aantal leerlingen.				502 6)
1). Leerlingental per 1 Augustus 1934, w.o. 2 Chineseen.				14.
2). Absentiepercentage der vroegere standardschool over Juni 1934.				
3). Waarvan 4 Chinesee leerlingen.				
4). Aantal leerlingen dat door de ouders is toegesegd.				
5). Waarvan 1 Chinesee leerling.				
6). Namelijk 102 inheemsche en 110 Chinesee leerlingen.				

Bepaalt men hierbij zijn aandacht bij de onderveroorzaking der inheemsche bevolkinggroepen, dan bij het dat het hiermede uitermate slecht is gesteld. Reukt men dat van de 28,015 kinderen, die deze bevolkinggroep in Landaek tellt, er 22,000 zijn die wegens hun leeftijd in de termen school kunnen vallen voor het volgen van volksonderwijs en tellt men anderszide het aantal kinderen op dat als leerling aan een der volksonderrichtingsscholen staat (inbegrepen, gezien de absentiecijfers, in gesamen deele implicieert dat zij ook werkelijk geregeld de school bezoeken), dan vindt men bij vergelijking dezer cijfers een in het oog springende wanverhouding.				
Het totaal aantal leerlingen van inheemschen landaard bedraagt nu 192 1), waarvan ruim 1/2 van Maleisichen landaard. Dit betekent dat iets meer dan 1/2 der inheemsche kinderen die daarvoor in aanmerking zouden kunnen schoolsonderwijs genieten van de Maleische bevolking zelfs niet meer dan ruim 1/2.				
Daaa				
1) Dit cijfer zijn de 85 leerlingen welke de binnenkort te Sangkoe te openen Volksschool zullen bezoeken, mede opgenomen.				

Data tentang pendidikan di Kalimantan Barat tahun 1934.
ANRI, MvO West Borneo hlm. 52



Pemberantasan buta huruf harus diintensifkan. ANRI, Arsip Kabinet Presiden RI No. 1220/9



Pemberantasan Buta Huruf di Yogyakarta. ANRI, Foto Kempen DIY No. 432

menjelma ide dalam menerjemahkan kehidupan ke dalam bentuk yang konkret, visual. Fotografer menjadi penanda keberadaan foto dan teks pada suatu tempat dan menjadi bukti bahwa mereka ingin masuk dalam lingkaran hermeneutik.

Kemunculan fotografi membuktikan pencapaian visual yang tak terbantahkan, bagaimana imaji tercipta setelah melalui proses panjang dari Aristoteles hingga Daguerre dan dari kamera Obscura ke analog sampai ke era digital. Proses transformasi tersebut mengubah sistem nilai perekaman gambar kontemporer. Kode-kode visual maupun teks yang mewujud pada selembur kertas menjelma menjadi transformasi estetis, gambar berikut teks melesat ke abad modern di mana nilai-nilai yang terkandung saat itu menjadi interpretatif sifatnya. Dalam sistem kebudayaan, foto berperan sebagai bukti tata nilai kemasyarakatan dengan segala aktifitas yang suka maupun yang duka. (Cahyadi Dewanto, "Relasi Kebudayaan, Lalu dan Kini", dalam Olivier Johannes Raap, *Soeka Doeka di Djawa Tempo Doeloe*, Jakarta, KPG, 2013, hlm. 182-185).



Sekolah membaca Al Qur'an di Jawa Barat (Jabar). ANRI, Foto KIT Jabar No. 355/16

Suatu bangsa tidak akan maju jika penduduknya terbelakang dan tidak dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu program pemerintah untuk melakukan pemberantasan buta huruf merupakan sebuah catatan yang harus digarisbawahi sehingga bangsa Indonesia dapat menjadi suatu bangsa yang eksis secara intelektual dan mempunyai rasa kebangkitan nasional yang tidak terbatas hanya terhadap satu sisi. Semua dapat kita pelajari dan telusuri dengan melihat arsip mengenai

pemberantasan buta huruf mulai dari masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga sekarang, baik arsip kertas, foto maupun filmnya.

Pemberantasan buta huruf yang dilakukan pemerintah adalah salah satu wujud kepedulian terhadap bangsa Indonesia dan merupakan sebuah catatan keberhasilan yang diraih dalam usaha kebangkitan nasional menuju Indonesia yang maju, sejahtera, adil dan makmur.